

Tanpa Reklamasi, Akan Bangun Jembatan Layang

DPRD Sebut Proyek *Coastal Road* Balikpapan Diambil Alih Pemprov Kaltim

Berdasarkan perhitungan semula, anggaran pembangunan jalan layang di tepi pantai Balikpapan menelan biaya Rp9 triliun.

BALIKPAPAN - Rencana pembangunan *coastal road* atau jalan tepi pantai di Balikpapan akan diambil alih Pemprov Kaltim. Pada rapat di kantor Pemkot Balikpapan kemarin (6/1), Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh menuturkan rencana tersebut merupakan arahan gubernur peraih suara terbanyak pada Pilgub Kaltim lalu, Rudy Mas'ud.

"Yang disarankan Pak Gubernur (terpilih) adalah jembatan layang jadi tidak merusak ekosistem yang lain. Jadi arahnya adalah jembatan yang dibangun mulai dari pelabuhan (Semayang) sampai tembus (gerbang) Tol Manggar. Itu tidak ada penimbunan tapi konsep jembatan layang tidak merusak ekosistem yang ada di laut," katanya.

Ketua DPRD Balikpapan 2014-2024 ini menuturkan sempat merasakan ribetnya birokrasi apabila membangun *coastal road* dengan proses reklamasi lebih dahulu. Proses perizinan reklamasi itu hampir 15 tahun dan tak kunjung tuntas sehingga membangun jalan layang tanpa melakukan reklamasi menjadi salah satu solusi yang bisa dilaksanakan.

"Jadi tidak ada reklamasi. Konsep jembatan layang saja tidak ada penimbunan. Kalau program Balikpapan *coastal area*, itu investor sudah berjalan hampir 12 tahun lebih. Bisa terlaksana atau tidak nanti *wallahualam*," kata politikus Golkar ini.

Abdulloh juga menyebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa, kewenangan pengelolaan laut 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan pengelolaan perairan laut sebelumnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dari 0-4 mil dan pemerintah provinsi hanya 4-21 mil.

Saat Pemkot Balikpapan menyusun konsep *coastal area*, dia menyebut masih berlaku pembagian kewenangan tersebut. "Sekarang dengan undang-undang yang baru, 0-12 mil adalah kewenangan provinsi dan arahan dari beliau (gubernur terpilih, Rudy Mas'ud), tidak ada penimbunan. Mohon dibantu (Pemkot) Balikpapan percepatan pembangunan untuk jalan layang tanpa penimbunan untuk memecah sementara kemacetan yang ada di Balikpapan," ucap Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan ini.

Dia pun meminta Pemprov Kaltim memulai menyusun kajian pembangunan jembatan layang *coastal road* ini pada APBD Perubahan Kaltim 2025. Agar penyusunan desain jembatan layangnya bisa dialokasikan pada APBD Kaltim Tahun 2026. "Start awal di (APBD) Perubahan 2025. Saya minta diberikan anggaran untuk kajian terlebih dahulu karena masih ada waktu 6 bulan, ini masih sempat. Kemudian (APBD) 2026 dimasukkan mungkin DED nya (*Design Engineering Detail*)," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Balikpapan memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan jalan layang di *coastal area* tersebut mencapai Rp9 triliun.

Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni menerangkan, rencana membangun jalan layang di tepi pantai Balikpapan sebelumnya sudah pernah dilakukan pemerintah pusat. Perencanaan jalan tersebut masuk dalam jaringan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghubungkan Bandara SAMS Sepinggang dengan Gerbang Tol Manggar.

Akan tetapi pembangunan tidak jadi dilaksanakan. "Sebelum jalan tol (IKN) dibangun Pempus (pemerintah pusat) dari bandara (SAMS Sepinggang) ke IKN, desain awalnya sebenarnya melalui laut lewat Sungai Manggar. Kemudian berubah ke arah darat. Jadi butuh sekitar Rp3 sampai Rp4 triliun waktu itu," katanya dalam forum yang sama kemarin.

Dia menambahkan, mengacu desain awal rencana jalan pendekat Tol IKN melalui laut di wilayah Balikpapan Timur itu membutuhkan anggaran sekitar Rp3 triliun. Jika ditambahkan dengan rencana pembangunan jalan layang *coastal road* maka membutuhkan anggaran sekitar Rp8 sampai Rp9 triliun. "Itu baru jalan layangnya saja dengan panjang dari (pelabuhan) Semayang sampai (gerbang tol) Manggar. Dengan panjang 10 sampai 15 kilometer," terang Murni.

Dia juga menyarankan apabila Pemprov Kaltim berencana ingin membangun jalan layang *coastal road* yang menyambungkan Pelabuhan Semayang dengan Gerbang Tol Manggar, maka ruas jalan yang bisa lebih dahulu adalah dari Bandara SAMS Sepinggang menuju Gerbang Tol Manggar karena dapat menjadi alternatif solusi pemecah kemacetan jalan menuju Balikpapan Timur.

"Kalau misalnya mau menyambungkan dari Pelabuhan Semayang sampai dengan Pintu Tol Manggar, sebaiknya dibangun lebih dahulu mulai dari bandara sampai Pintu Tol Manggar dulu untuk memecah kemacetan juga di wilayah timur. Itu jauh lebih baik jadi itu dulu. Nanti baru menyambungkan lagi dari bandara sampai ke Pelabuhan Semayang," pungkasnya. **(kip/riz)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Tanpa Reklamasi Akan Bangun Jembatan Layang, DPRD Sebut Proyek *Coastal Road* Balikpapan Diambil Alih Pemprov Kaltim, 07/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
2. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU 23/2014 diatur bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.